

RELASI IDEOLOGI, KEKUASAAAN, DAN MEDIA

Supriyanto Candra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email : supriyanto_candra@yahoo.com

ABSTRACT

The media is actor of important politic that capable shape how the public think and feel about various of event and experience. This is where the ideology and power entry into it. The ideology and power can't released from power of business and economic. Travel minority the muslim of Melayu in this Southern Thailand is travel of long search for identity. The complexity the history of violence in this Southern Thailand that reported by "The Nation" reflect a relation of ideology, power and media. The issues of justice society of economic very strong be expressed in every event of upheaval. However from analysis that depth, we encountered factors that more complex from just issue of social ekonomik. However we found also in there a factors for example psychology, social, local police, and culture islamic, a aspiration that play role in every event violence in this regional.

Media adalah aktor politik penting yang mampu membentuk bagaimana publik berpikir dan merasa mengenai berbagai peristiwa dan pengalaman. Di sinilah ideologi dan kekuasaan masuk ke dalamnya. Ideologi dan kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari kekuatan bisnis dan ekonomi. Perjalanan minoritas Muslim Melayu di Thailand Selatan ini adalah perjalanan panjang pencarian identitas. Kompleksitas sejarah kekerasan di Thailand Selatan ini yang diberitakan oleh The Nation mencerminkan sebuah relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media. Isu keadilan sosial-ekonomi sangat kuat disuarakan dalam setiap peristiwa pergolakan. Namun demikian, dari analisis yang lebih mendalam, kita jumpai faktor-

faktor yang lebih kompleks dari sekadar persoalan sosial-ekonomi. Akan tetapi kita temukan juga di sana faktor-faktor seperti psikologi-sosial, kebijakan lokal, dan kebudayaan Islam, sebagai aspirasi yang memainkan peranan dalam setiap peristiwa kekerasan di kawasan ini.

Keyword: Ideology, power, Media, violence, Culture, justice, Framing

PENDAHULUAN

Paper ini membuat kajian terhadap potret kekerasan yang berlangsung di daerah Muslim-Melayu di Thailand Selatan sebagaimana diberitakan oleh koran berbahasa Inggris, terbitan Bangkok, *The Nation*. Materi yang dianalisis adalah empat peristiwa kekerasan yang berlangsung pada 2004. Empat peristiwa itu terdiri dari dua agresi yang dilakukan pemerintah terhadap militan, dua agresi yang dilakukan sebaliknya. Ideologi dan kekuasaan masuk ke dalam kancah kekerasan dan memperumit penjelasan akar-akar kekerasan di wilayah ini. Latar belakang sejarah wilayah yang didominasi Muslim-Melayu ini sangat penting untuk memahami dinamika kekerasan yang berlangsung dewasa ini.

Paper ini terutama hendak mengkaji pertanyaan mayor dan minor berikut: Bagaimana relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media tercermin dalam kekerasan di Thailand Selatan sepanjang tahun 2004? Bagaimana pola-pola penjelasan Marxian mengenai pertentangan dan konflik antar kelas bisa digunakan untuk menjelaskan kekerasan yang berlangsung? Bagaimana media yang tidak bisa lepas dari hukum pasar bebas dan pluralisme kebenaran memainkan peranan kritis? Bagaimana Wacana (*Discourses*) dan Kebudayaan yang Hidup (*Lived Culture*) ikut masuk dan terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan?

Dalam setiap peristiwa kekerasan di tengah-tengah masyarakat berlangsung relasi ideologi dan kekuasaan. Pertentangan antar kelas terlukiskan dalam pemberitaan Media. Kompleksitas kekerasan ini juga diwarnai dengan arus postmodernisme dan pluralisme kritis serta

berbagai wacana yang berkembang menjadi kebudayaan sehari-hari yang hidup dalam masyarakat. Di samping berlangsung di dalam konflik antara pemerintah dan rakyat, Media juga masuk ke dalam jaringan relasi ideologi dan kekuasaan.

IDEOLOGI MARXIAN

Konsep ideologi memiliki peranan penting untuk menjelaskan hubungan antara media dan pola-pola kekuasaan. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 117-133).

Penjelasan Karl Marx (1818 - 1883) mengenai realita dan kehidupan selalu harus dimulai dengan konsepnya mengenai kapitalisme (sistem kehidupan ekonomi baru tentang profit dan pasar). Dalam sistem kapitalisme hadir dua kekuasaan (*power*) yang saling berhadapan: kelas pemilik modal (kapitalis) dan kelas pekerja (proletar). (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118) Tesis Marx secara ringkas mengatakan demikian. Di satu pihak, jika kelas pekerja bersatu dalam gerakan dan aksi, mereka memiliki *power* untuk mengubah sejarah. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118) Di lain pihak, Marx menggunakan konsep ideologi untuk menjelaskan bagaimana para kapitalis mempertahankan dan melindungi kepentingan ekonominya ketika menghadapi situasi krisis.

Ideologi, secara ringkas bisa dikatakan sebagai ‘kesadaran palsu’, menjadi elemen penting dalam studi media. Ketika masyarakat tidak mau ditindas dan memperjuangkan konsensus, media bisa memainkan peranan yang sangat signifikan dalam mewujudkan perjuangan merebut sistem nilai ini. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118 - 119) Hubungan ideologi, kekuasaan, Marxis, dan Media, melibatkan apa yang disebut ‘propaganda’.

Beberapa peristiwa dunia berikut ini telah mendorong beberapa pemikiran dan teori Marxis klasik ditinjau kembali. Runtuhnya blok sosialisme pada 1989 dan hancurnya ekonomi sosialis Rusia. Peristiwa historis ini kerap dianggap sebagai akhir dan gagalnya Marxisme, yang segera diikuti dengan lahirnya kapitalisme dengan kekuatan baru yang disebut ‘pasar bebas’. Situasi itu segera diikuti dengan masuknya pengaruh sistem pemikiran postmodernisme. Pemikiran terakhir ini,

antara lain, nampak dalam serangan aliran dekonstruksi untuk membuang segala upaya untuk mengonstruksi dunia, dan sikap skeptis terhadap kebenaran absolut.

Di kutub lain, marak model pluralisme yang melihat media sebagai kekuatan yang ‘mengapung-apung menikmati kebebasan’. Media memiliki kebebasan untuk memilih keanekaragaman bentuk dan produk.¹ Meski demikian, pilihan mereka ternyata tidak sepenuhnya bebas. Media tidak bisa keluar dari hukum pasar bebas. Dengan demikian, kalau ada tabloid hiburan yang mendominasi pasar, ini bisa dipahami dengan satu penjelasan, yaitu format dan isinya mampu memenangkan pasar.

Meski konsep ‘ideologi dominan’ sebagaimana cara berpikir Gramscian itu memang ada, tetapi ideologi dominan bukanlah penentu segala-galanya. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125 - 126) Sebaliknya, sebagai alternatif, diajukan terminologi ‘wacana’ (*discourses*) dan ‘kebudayaan yang hidup’ (*lived cultures*), Kajian media sekarang ini tidak lagi memakai teori ‘satu ideologi’ atau ‘satu sistem gagasan’ untuk menjelaskan realitas. Kajian ini mengamati berbagai *ideologies* dan *identities* yang hidup dalam realitas biasa. Keanekaragaman ideologi dan identitas ini memiliki keterkaitan dengan keragaman etnik, agama, kaum marginal, jender, yang bekerja dalam wacana dan kebudayaan sehari-hari.

PEMAKNAAN TEORI IDEOLOGI DAN KEKUASAAN

Kompleksitas sejarah kekerasan di Thailand Selatan ini yang diberitakan oleh *The Nation* mencerminkan sebuah relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media. Relasi itu melibatkan kekuasaan dan kekuatan ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini, isu keadilan sosial-ekonomi sangat kuat disuarakan dalam setiap peristiwa pergolakan. Hal ini didukung oleh sebuah survei. Menurut survei ini, eskalasi kekerasan berlangsung sangat signifikan setelah pelantikan Thaksin pada 2001. Sebagai

¹ Kalau mau disebutkan, ideologi yang dominan pada abad 21 ini bisa dilukiskan sebagai berikut: “Segala sesuatu adalah relatif. Tidak struktur raksasa yang sedemikian kuat. Semua memiliki kebebasan. Dengan demikian, tidak ada yang bisa disebut ‘ideologi dominan’.”

seorang pelaku bisnis, pendekatannya sangat ekonomis. Pendekatan ini telah menimbulkan perbedaan kelas yang rentan memicu konflik. (Jones, 2007 : 10)

Dengan pendekatan Marxian, penjelasan sejarah sejak satu abad lalu hingga dewasa ini memperlihatkan ‘ideologi’ yang muncul dalam rupa ‘konflik dan pertentangan kelas’. Para ahli menganggap bahwa gerakan ini bisa ditelusuri dalam tiga gelombang separatisme di Thailand Selatan. Semua gerakan separatisme ini memiliki ujung dan asal-usul perlakuan marginalisasi terhadap etnis Melayu dan Muslim oleh rejim yang mewakili simbol Thai dan Budhis. *Pertama*, marginalisasi ini bermula dari ‘pencaplokan’ wilayah ini oleh Kerajaan Thai yang fokus perjuangannya pada pengambilan kembali identitas etnik Melayu-Muslim (Awal Abad 20 - Pertengahan Abad 20). *Kedua*, berfokus perjuangan identitas Islam (Pertengahan Abad 20 - 2000). Akhirnya, *ketiga*, tidak langsung terkait dengan identitas Melayu atau pun Islam (2000 - 2004). Gerakan moral ini memfokuskan pada perjuangan keadilan, yaitu ketika Thaksin Shinawatra mencabut program-program strategis yang diciptakan sebagai jembatan negosiasi ke dua belah pihak. (Jones, 2007 : 33 - 35)

Media juga memainkan dalam pembentukan ideologi. Ia memiliki kekuasaan untuk membendung segala ideologi lain yang hendak memaksakan kebenaran tunggal. Ini mendukung teori yang mengatakan bahwa realitas dipengaruhi aneka ragam faktor. Posisi ‘pluralisme kritis’ ini memperlihatkan adanya persaingan wacana untuk menjelaskan realita yang akan terus diperebutkan. Media menjadi salah satu kekuatan yang hadir dalam persaingan dan perebutan itu. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125 - 125)

Media memeragakan *power*-nya itu dengan melakukan *framing* (pembingkai). (T. Michael Maher, t.t : 90-91) Empat fungsi *framing*: mendefinisikan persoalan, mendiagnosa sebab-akibat, memberikan pertimbangan moral, dan menyampaikan usulan perbaikan. Empat fungsi ini juga dapat ditemukan dalam berbagai tulisan *The Nation* ketika melukiskan kekerasan dan reaksi pemerintah terhadap kekerasan yang berlangsung di Thailand selatan. (Jones, 2007 : 16)

Kajian media sekarang ini tidak lagi memakai teori ‘satu ideologi’ atau ‘satu sistem gagasan’ untuk menjelaskan realitas. Sebagai alternatif, media menggunakan ‘wacana’ (*discourses*) dan ‘kebudayaan yang hidup’ (*lived cultures*)². Kajian ini mengamati *ideologies* dan *identities* yang hidup dalam realitas biasa. Keanekaragaman ideologi dan identitas ini memiliki keterkaitan dengan etnik, agama, kaum marjinal, jender, yang bekerja dalam wacana dan kebudayaan sehari-hari. Peristiwa kekerasan 2004 hanya bisa dipahami jika ia diletakkan dalam sejarah panjang masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan. Semuanya tercermin dalam gejolak kekerasan yang akan kita diskusikan lebih lanjut.

KEKERASAN DI THAILAND SELATAN

Sejak diangkat Pebruari 2001 hingga dipilih kembali kembali Pebruari 2005, Perdana Menteri Thailand ke 23, Thaksin Shinawatra, menghadapi sejumlah peristiwa kekerasan demi kekerasan yang berlangsung di bagian selatan Thailand.³ Periode ini menjadi fokus studi ini. Empat peristiwa hitam yang berlangsung di Thailand Selatan sepanjang tahun 2004, langsung menyedot perhatian publik internasional.

1. Serangan Markas Militer Rajanakarin (4 Januari 2004)

Serangan terhadap *Royal Thai Army's Fourth Engineering Battalion* di Provinsi Narathiwat berlangsung saat subuh. Serbuan besar ini menandai pergantian tahun baru 2004, dan dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut: Sekitar 60 hingga 100 orang terlibat dalam kekacauan ini, 300 - 400 senjata berhasil direbut dari militer, 4 tentara dan 2 polisi terbunuh. Kejadian ini segera memicu kejadian lain berupa pembakaran 20 sekolah milik pemerintah dan tiga pos polisi di 13 distrik di Narathiwat. (Jones, 2007 : 67) Pada 5 Januari, polisi di Pattani

² Raymond Williams (1921 - 1988) menjelaskan *lived cultures*, sebagai ekspresi kebudayaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia sendiri berkeyakinan bahwa *culture is ordinary*, yang tertanam dalam masyarakat biasa dan ada dalam pikiran mereka. Dengan demikian, menurutnya, kebudayaan adalah seluruh tata kehidupan sehari-hari yang beredar ditengah-tengah masyarakat.

³ Berbeda dengan periode pertama yang berjalan relatif mulus, Thaksin dipaksa berhenti oleh *Coup* oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin pada 19 September 2006

menemukan beberapa bom yang ditanamkan di beberapa tempat di Provinsi ini.

2. Serangan Pertama terhadap para Rahib Budhis (22 Januari 2004)

Dalam sejarah gerakan separatis di Thailand Selatan, konflik fisik langsung selalu ditujukan terhadap simbol-simbol rejim pemerintahan (pos polisi, barak, sekolah pemerintah). Gambaran ini berubah pada 22 Januari 2014, di Narathiwat. Pada hari itu, seorang rahib ditebas dengan kapak hingga mati oleh dua orang bersepeda motor berpakaian gelap *ala* ninja. Keesokan harinya, dua warga biasa Budhis mengalami nasib yang sama, satu terluka lainnya meninggal. Dalam satu minggu, beberapa kejadian serupa berulang. Berbagai ancaman beredar dan tersebar membuat sekitar seribu sekolah diliburkan untuk alasan keamanan. Pergeseran kekerasan dari target rejim yang berkuasa ke target simbol-simbol agama dan umat agama lain berlangsung di kawasan yang selama ini memiliki citra hidup damai antara dua pengikut agama tersebut.

3. Serangan Mesjid Krue Sue (28 April 2004)

28 April 2004 dilukiskan sebagai hari paling berdarah dalam sejarah Thailand Selatan. Tragedi berdarah kali ini merupakan reaksi militer atas serangan terhadap beberapa pos polisi di dekat Mesjid *Krue Sue* di Pattani. Didahului oleh pertempuran antar dua kubu yang membuat para militan mundur dan bersembunyi di dalam Mesjid itu. (Jones, 2007 : 69) Setelah enam jam mengepung, militer menyerbu ke dalam Mesjid. Kurang dari sepuluh menit, 32 militan, umur antara 15 hingga 63 tahun tewas, tidak ada satu pun yang tersisa. Pemerintah selalu menekankan bahwa mereka yang tewas adalah para pemabuk yang baru saja minum minuman keras. Ada 35 artikel yang muncul di *The Nation* yang memenuhi kriteria riset ini.

4. Tragedi Tak Bai (25 October 2004)

Sekitar 1500 orang berkumpul di depan stasiun polisi distrik Tak Bai, Narathiwat. Mereka berkumpul untuk memrotes penangkapan enam sukarelawan keamanan yang dituduh memberikan senjatanya pada para militan. Setelah beberapa jam tidak ada solusi, sekitar jam tiga sore massa mulai mencoba membongkar barikade polisi. Dalam

titik khaos ini, Jenderal Pisarn Wattanawongkiri dari *Fourth Army Region* memerintahkan pembubaran massa. Ketika tembakan ke udara dan gas air mata diluncurkan, para pemrotes segera membalas dengan melemparkan batu, botol, dan benda apa saja yang ada ke arah polisi. Setelah beberapa menit, seluruh massa disuruh merunduk, perempuan dan anak-anak diminta untuk meninggalkan tempat dan pulang. Sekitar 1300 laki-laki diangkut ke truk dan dibawa ke kamp militer. (Jones, 2007 : 71) Dalam tragedi ini, laporan versi pemerintah, terdapat 6 orang meninggal ketika demo, 78 meninggal dalam perjalanan ke kamp militer, dua polisi meninggal. *The Nation* mengeluarkan 77 artikel dalam seluruh peristiwa ini. (Jones, 2007 : 72)

ANALISIS KASUS KEKERASAN DI THAILAND SELATAN

Dalam analisis berikut, paper ini hendak menjelaskan bahwa ideologi dan kekuasaan hadir ketika media melakukan konsep *framing*⁴ sebagaimana yang dibuat oleh *The Nation*. Dalam mempublikasikan berita-berita kekerasan di Thailand Selatan sepanjang 2004, *The Nation* menggunakan tiga model framing: “Kekerasan di Selatan: Problem Regional” (*Southern Violence: A Regional Problem*), “Ancaman Terorisme Internasional” (*The Threat of International Terrorism*) dan “Lari dari Tanggungjawab” (*Shirking Responsibility*.)” Ideologi dan kekuasaan yang ada di balik kekerasan ini hendak dijelaskan dalam tiga pertanyaan berikut ini:

1. *Bagaimana penjelasan teori ideologi dan kekuasaan dalam pola-pola Marxian pertentangan dan konflik antar kelas bisa digunakan untuk menjelaskan kekerasan yang berlangsung di Thailand Selatan?*

The Nation menggunakan “Kekerasan di Selatan” untuk membangun persepsi bahwa tiga provinsi di Selatan yang bergejolak⁵

⁴ Setiap manusia menciptakan dan membangun ‘kerangka referensi’ (*frames of reference*) untuk memahami informasi baru dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka ini digunakan sebagai basis untuk membuat respon dan tanggapan atas peristiwa-peristiwa. Disinilah manusia mendefinisikan ‘dunia dan kehidupan’. Demikian pula, media menggunakan *framing* untuk mengorganisir sebuah pengalaman. Yaitu agar pembaca atau penonton mampu mencerna dan menerima dengan akal-budinya sebuah topik, peristiwa dan kisah tertentu. (Jones, “Framing the Violence in Southern Thailand”, 14).

⁵ Tiga Provinsi yang dimaksud adalah Narathiwat, Pattani, dan Yala. Beberapa sumber biasanya menyebutkan dan menambahkan satu provinsi lain Songkhla.

itu berbeda bahkan terpisah dari 14 provinsi yang ada di Selatan, dan terpisah dari 73 provinsi yang relatif damai. Di sini *The Nation* memperlihatkan adanya ‘pertentangan kelas’ yang menjadi ciri pola-pola Marxian dalam menjelaskan ideologi dan kekuasaan.

Ada dinamika bahasa yang digunakan *The Nation* untuk melukiskan “Kekerasan di Selatan”. Di awal tahun 2004, koran ini menggunakan bahasa yang memberi tekanan pada perbedaan fisik dan kultural Muslim-Thai, dalam komparasinya dengan mayoritas Thailand yang Budhis. Kemudian, koran ini menggunakan bahasa yang lebih netral. Dan akhirnya, *The Nation* menegaskan perbedaan antara Muslim-Thai dengan Muslim militan. (Jones, 2007 : 73 - 74)

Untuk memahami kekerasan yang berlangsung di kawasan ini, penjelasan dan penelusuran sejarah dibutuhkan. Kekerasan di beberapa provinsi Melayu-Muslim yang berpuncak pada 2004 ini bukan peristiwa yang bergolak dalam ruang hampa (*vacuum*). Ia memiliki akar dalam gerakan-gerakan yang terjadi jauh sebelumnya.

Para ahli menganggap bahwa gerakan ini bisa ditelusuri dalam tiga gelombang separatisme di Thailand Selatan. Semua gerakan separatisme ini memiliki ujung dan asal-usul perlakuan marjinalisasi terhadap etnis Melayu dan Muslim oleh rejim yang mewakili simbol Thai dan Budhis. Marjinalisasi ini bermula dari ‘pencaplokan’ wilayah ini oleh Kerajaan Thai. Inilah gelombang pertama separatisme yang fokus perjuangannya pada pengambilan kembali identitas etnik Melayu-Muslim yang direbut oleh Kerajaan Thai (Awal Abad 20 - Pertengahan Abad 20). Sedangkan gelombang kedua berfokus pada identitas dan ideologi Islam (Pertengahan Abad 20 - 2000). Akhirnya, gelombang ketiga tidak langsung terkait dengan identitas Melayu atau pun Islam (2000 - 2004). Gerakan moral yang berfokus pada pencarian keadilan ini berlangsung ketika Thaksin Shinawatra mencabut program-program strategis yang diciptakan sebagai jembatan negosiasi ke dua belah pihak. Gelombang separatisme ini bergerak meluas yang berlangsung dewasa ini melibatkan massa anak muda tipikal engerjik, tetapi pengangguran dan tersingkir. (Jones, 2007 : 33 - 35)

Dengan pendekatan Marxian, penjelasan sejarah sejak satu abad lalu hingga dewasa ini memperlihatkan ‘ideologi’ yang muncul dalam

rupa 'konflik dan pertentangan kelas'. Dua pokok bahasan relevan untuk menjelaskan kekerasan di Thailand Selatan: (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118)

Pertama, ide-ide yang mendominasi dalam masyarakat berasal dan merupakan produk dari kelas yang berkuasa. Ide-ide ini kemudian menjadi kebenaran yang diterima begitu saja dan tidak pernah dipertanyakan lagi. Ideologi ini digunakan oleh mereka yang memiliki alat produksi untuk mengontrol masyarakat. *Kedua*, teori Marx 'basis-superstruktur' yang memiliki sifat determinis-ekonomis juga bisa memberikan penjelasan. Dalam keyakinan ini, 'basis' (ekonomi) akan menentukan kehidupan pada level 'superstruktur' (struktur politik, sosial, kebudayaan, agama, dan sebagainya). Kehidupan ekonomi, sebagai faktor primer, akan menentukan (bukan hanya memengaruhi) faktor sekunder, yaitu aktivitas kultural dan politik. Kekerasan demi kekerasan yang menimpa Muslim-Melayu di Thailand bisa dijelaskan dengan menggunakan cara berpikir ini. (F. Budi Hardiman Hardiman, 2004 : 241)

Bandingkan teori tersebut di atas dengan hadirnya Perdana Menteri dari kalangan sipil pertama di Thailand pada 2001, yaitu Thaksin Shinawatra yang adalah salah seorang terkaya di negeri itu. Ia menyalurkan dana besar di wilayah Selatan untuk menghidupkan usaha menengah dan kecil. Pemerintah ini juga membangun infrastruktur, bahkan menyalurkan dana untuk pondok pesantren. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Meski demikian, Thaksin melakukan semuanya itu dalam kerangka dan kepentingan ekonomi dan bisnis. Dia membangun ideologi dan kekuasaan lewat uang. Usaha yang bagus ini dihanguskan oleh beberapa peristiwa kekerasan di 2004. Pada pemilihan umum 2005, Thaksin kehilangan seluruh kursi partai di Selatan. (Ahmad Suaedy, 2012 : 61)

MEDIA, HUKUM PASAR BEBAS DAN PLURALISME KEBENARAN

Framing "Ancaman Terorisme Internasional" yang dibuat oleh *The Nation* berkembang dan berubah dari satu konteks ke konteks lainnya. *The Nation* memperlihatkan bahasa manipulatif 'ancaman terorisme internasional' digunakan pemerintah untuk menumpas segala

gerakan separatistis di Thai Selatan. Bahasa-bahasa keras ini digunakan setelah peristiwa di Masjid Krue Se pada 28 April 2004. (Jones, 2007 : 77)

“Lari dari Tanggungjawab” adalah *framing* lain yang digunakan *The Nation* untuk memperlihatkan tindakan keliru dan salah langkah yang dilakukan militer dan Thaksin. *Framing* ini dialihkan dan ditujukan pada Thaksin sebagai Perdana Menteri yang harus bertanggungjawab atas semua bencana ini. Setelah reaksi keras oleh Pemerintah atas tragedi Masjid Krue Se (28 April 2004) dan Tak Bai (25 Oktober 2004), dan laporan Pemerintah yang tidak konsisten, *The Nation* secara serius mulai mempertanyakan sejauh mana Pemerintah Thai memahami kasus ini, dan sekali lagi menuntut pertanggungjawabannya. (Jones, 2007 : 83)

Dua *framing* di atas membuktikan bahwa media juga memainkan dalam pembentukan ideologi. Ia memiliki kekuasaan untuk membendung segala ideologi lain yang hendak memaksakan kebenaran tunggal. Empat fungsi *framing* adalah mendefinisikan persoalan, mendiagnosa sebab-akibat, memberikan pertimbangan moral, dan menyampaikan usulan perbaikan. Empat fungsi ini juga dapat ditemukan dalam berbagai tulisan *The Nation* ketika melukiskan kekerasan dan reaksi pemerintah terhadap kekerasan yang berlangsung di Thailand selatan. (Jones, 2007 : 16)

Ditengah-tengah masyarakat berlangsung interaksi beberapa kekuatan sekaligus: ekonomi, politik, kekuasaan ‘memaksa’ gaya militeristik, dan ‘kekuatan simbolis’ yang tampil dalam wujud informasi dan komunikasi. Pendekatan teoretis untuk memahami realitas yang dipengaruhi aneka ragam faktor itu disebut ‘pluralisme kritis’. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125)

Penjelasan di atas menambahkan sebuah fenomena yang menjelaskan adanya anggapan bahwa Marxisme sudah berakhir.⁶ Era ini segera diikuti dengan lahirnya kapitalisme dengan kekuatan baru yang disebut ‘pasar bebas’. Dalam situasi itu, berkembang pemikiran

⁶ Beberapa peristiwa dunia membuat pemikiran dan teori Marxis klasik ditinjau kembali: Runtuhnya blok sosialisme pada 1989, terutama hancurnya ekonomi sosialis Rusia.

postmodernisme, aliran dekonstruksi yang berkecenderungan untuk membuang segala upaya untuk mengonstruksi dunia, dan tumbuhnya sikap skeptis terhadap keyakinan adanya kebenaran absolut. (Franz Magnis-Suseno, 2003 : 137) Media, dengan demikian, adalah aktor politik penting yang mampu membentuk cara berpikir dan merasa publik terhadap berbagai peristiwa dan pengalaman. (Jones, 2007 : 16)

Media memiliki kebebasan untuk memilih keanekaragaman bentuk dan produk.⁷ Meski demikian, pilihan mereka ternyata tidak sepenuhnya bebas. Media tidak bisa keluar dari hukum pasar bebas. Pada saat yang sama teori media juga mengalami pergeseran. Teori media memberi tekanan pada kekuatan audiens.⁸

2. Bagaimana Wacana (*Discourses*) dan Kebudayaan ‘Yang Hidup’ (*Lived Culture*) ikut masuk dan bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa kekerasan di Thailand Selatan?

Meski konsep ‘ideologi dominan’ sebagaimana yang dirumuskan oleh Gramsci dan para pengikutnya cukup meyakinkan, namun ideologi dominan bukanlah satu-satunya penentu untuk menerangkan realitas. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125 - 126) Sebagai alternatif, muncul terminologi ‘wacana’ (*discourses*) dan ‘kebudayaan yang hidup’ (*lived cultures*). Kajian media sekarang ini tidak lagi memakai teori ‘satu ideologi’ atau ‘satu sistem gagasan’ untuk menjelaskan realitas. Kajian ini mengamati *ideologies* dan *identities* yang hidup dalam realitas biasa. Keanekaragaman ideologi dan identitas ini memiliki keterkaitan dengan etnik, agama, kaum marjinal, jender, yang bekerja dalam wacana dan kebudayaan sehari-hari. Semuanya tercermin dalam gejala kekerasan yang akan kita diskusikan lebih lanjut.

⁷ Kalau mau disebutkan, ideologi yang dominan pada abad 21 ini bisa dilukiskan sebagai berikut: “Segala sesuatu adalah relatif. Tidak ada struktur raksasa yang sedemikian kuat. Semua memiliki kebebasan. Dengan demikian, tidak ada yang bisa disebut ‘ideologi dominan’.”

⁸ Ideologi pasar dan realitas mikropolitik telah mengikis dan *memreteli* nilai-nilai tradisi panjang debat intelektual. Olah pikir berhenti, dan sebagai gantinya, lahir TV dan mal-mal raksasa yang merajalela mengisi kehidupan manusia. Tidak ada jalan lain, mesin politik harus menerima dan memanfaatkan sistem kapitalisme seadanya dan semampunya. (Fredric Jameson, “Secondary Elaborations” dalam Fredric Jameson, *Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism*, (Durham, NC: Duke University Press. 1999), 318 - 331 (319 - 320).); Dengan demikian, kalau ada tabloid hiburan yang mendominasi pasar, sebagai contoh, ini bisa dipahami karena format dan isinya populer dan mampu memenangkan pasar. (Branston and Stafford, *The Media Student’s Book*, 123.)

Sejarah dari beberapa provinsi Muslim-Melayu ini menunjukkan bahwa gerakan separatis berkembang dalam tiga gelombang: Pertama, paling awal, berupa gerakan yang ditandai dengan pencarian identitas Melayu (awal abad 20 - akhir 1950an). Kedua, gerakan dengan warna dan penguatan unsur dan ideologi Islam. Ketiga, gerakan umum yang bukan pertama-tama diwarnai cita-cita untuk merdeka, maupun perjuangan ideologi Islami, melainkan perjuangan moral-sosial dengan tuntutan keadilan. (Jones, 2007 : 9)

Tiga gelombang gerakan separatisme Melayu-Muslim di Thai Selatan sebagaimana sudah disebutkan di atas dengan demikian memiliki kemiripan pola, tetapi sangat berbeda dalam agendanya. Untuk memahami lebih mendalam, sejarah komunitas dan proses inkorporasinya ke dalam Kerajaan Thai di abad 18, harus didalami. Latar belakang sejarah ini sangat penting untuk memahami dinamika kekerasan yang berlangsung dewasa ini. (Jones, 2007 : 12) Peristiwa kekerasan 2004 hanya bisa dipahami jika ia diletakkan dalam sejarah panjang masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan. Dari sana akan kita temukan konsep ideologi dan kekuasaan dalam wujud 'wacana' dan 'kebudayaan yang hidup'.

Islam datang di Thailand Selatan pada abad 14. Sepanjang tiga abad berikutnya, mereka hidup relatif damai berdampingan dengan masyarakat yang berbeda. Masyarakat Muslim dan Budhis memiliki kedaulatannya masing-masing. Konflik sistematis berlangsung sejak Chulalongkorn, Raja Kerajaan Siam, memerintah (1868 - 1910). Ia ingin menerapkan model negara-bangsa dengan menerapkan batas-batas wilayah kerajaan secara ketat. Kawasan Semenanjung Malaya atau Patani Raya yang semula dikuasai oleh Kesultanan Patani Islam, digabungkan ke dalam wilayah Kerajaan Siam. Penggantinya, Raja Wachiravut (1910 - 1925), seorang yang mengenyam pendidikan Eropa, bahkan menanamkan konsep patriotisme ala nasionalisme Barat, dengan mendirikan lembaga paramiliter untuk menjaga Kerajaan. (Ahmad Suaedy, t.t : 55 - 56)

Pada 1902, Kerajaan Siam menyerahkan sebagian wilayah Thailand Selatan ke kolonialisme Inggris.⁹ Langkah ini dilakukan untuk menghindari aneksasi wilayah Thai ke dalam kolonisasi Inggris. Di satu

pihak, Thailand sampai sekarang menganggap bahwa mereka adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh Barat. Di lain pihak, masyarakat Muslim-Melayu memiliki ingatan kolektif bahwa mereka berada di bawah penjajahan abadi Kerajaan Siam. 'Ingatan kolektif' ini menjadi sebuah 'wacana' yang terus hadir dalam kehidupan masyarakat ini.

Demikian pula dalam rangka pembentukan nasionalisme, asimilasi dan penyeragaman budaya juga diberlakukan di Selatan. Penggantian nama dari Siam menjadi Thailand (1939), menghapus keanekaragaman itu. Semuanya, secara ofisial, menjadi satu etnis yaitu Thailand. Di sana tidak ada lagi Muslim Siam atau Melayu Muslim. Pada periode berikutnya, bahkan adat daerah khas Melayu Muslim, seperti sarung, peci, dan sebagainya dilarang digunakan di publik. (Ahmad Suaedy, t.t : 59 - 60) Praktik ini merupakan contoh bagaimana 'kebudayaan yang hidup' dengan dieliminasi.

'Kebudayaan yang hidup' dalam realitas sehari-hari ini menyatu dengan akal dan jiwa masyarakat, sehingga menjadi pegangan manusia banyak orang, masyarakat dan warga. Kebudayaan semacam ini merupakan jejak dan tapak yang berasal dari peninggalan sejarah ratusan atau ribuan tahun yang lalu. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 130) Inilah 'kebudayaan yang hidup'.

Sebagian konsep 'kebudayaan yang hidup' berasal dari pemikiran Gramsci. Gramsci menegaskan bahwa hegemoni juga merupakan hasil dari sebuah proses yang dihidupi oleh suatu masyarakat. Ia bukan sekadar ide yang mengawang-awang. Kekuasaan dan kekuatan 'rasio' datang dan lahir dari sebuah pergumulan orang-orang dalam kehidupan riil. Isu mengenai 'identitas nasional', misalnya, kerap dikobarkan oleh orator politik sebagai propaganda. (Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 130)

KESIMPULAN

Kompleksitas sejarah kekerasan di Thailand Selatan ini yang diberitakan oleh *The Nation* mencerminkan sebuah relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media. Relasi itu melibatkan kekuasaan dan kekuatan

ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini, isu keadilan sosial-ekonomi sangat kuat disuarakan dalam setiap peristiwa pergolakan.

Survei juga mengatakan bahwa insiden kekerasan yang terkait dengan politik yang berlangsung 1993 - 2003 sebanyak 750 kejadian, sedangkan pada 2004 saja berlangsung 1843 insiden. (Jones, 2007 : 10) Menurut survei ini, eskalasi kekerasan berlangsung sangat signifikan setelah pelantikan Thaksin pada 2001.¹⁰

Dari analisis yang lebih mendalam, kita jumpai faktor-faktor yang lebih kompleks dari sekadar persoalan sosial-ekonomi. Akan kita temukan juga di sana faktor-faktor seperti psikologi-sosial, kebijakan lokal, dan kebudayaan Islam, sebagai aspirasi yang memainkan peranan dalam setiap peristiwa kekerasan di kawasan ini.

Media, sebagai salah satu kekuatan, memainkan peranan kritisnya pula. Ketika kekerasan demi kekerasan merambah naik, liputan media juga semakin meningkat. Sepanjang 2001, *The Nation* memublikasikan sekitar 25 tulisan yang melaporkan apa yang berlangsung di Selatan. Dalam periode 2002 - 2003, *The Nation* memublikasikan sekitar 60 berita. Pada 2004, terjadi ledakan jumlah berita pada harian itu menjadi 450. (Jones, 2007 : 10)

Dalam setiap peristiwa kekerasan di tengah-tengah masyarakat berlangsung relasi ideologi dan kekuasaan. Pertentangan antar kelas terlukiskan dalam pemberitaan media. Kompleksitas kekerasan ini juga diwarnai dengan arus postmodernisme dan pluralisme kritis serta berbagai wacana yang berkembang menjadi kebudayaan sehari-hari yang hidup dalam masyarakat. Di samping berlangsung di dalam konflik antara pemerintah dan rakyat, media juga masuk ke dalam jaringan relasi ideologi dan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Akbar S. dan Hastings Donnan (ed). *Islam, Globalization and Postmodernity*. London and New York: Routledge, 1994.
- Bianchi, Robert. "Capitalism and Islam". Dalam John L Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (Vol I). London: Oxford University Press, 1995.
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. London: The University of Chicago Press, 1988.
- Bottomore , Tom. *The Frankfurt School*. London-New York: Ellis Horwood/ Tavistock, 1984.
- Branston, Gill and Roy Stafford, "Ideologies and Power". Dalam *The Media Student's Book*. London: Routledge, 2003 (third edition).
- Engels, Fredrick. "Socialism: Utopian and Scientific", 1880, <http://ada.evergreen.edu/~arunc/texts/politics/socialism.pdf>, (Diunduh 20 Oktober 2014))
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern. Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hefner, Robert W. *Islam Pasar Keadilan. Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Irr, Caren and Ian Buchanan eds. *On Jameson : From Postmodernism to Globalization*. Washington: State University of New York Press, 2006.
- Jameson, Fredric. *Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature*. Princeton: Princeton University Press. 1971.